



**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
MENGUNAKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 5 TAHUN  
2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SPBE**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Komputer

Oleh

**WILDAN ZAINUL FAKI**

**NIM 152410101007**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk mempermudah dan melancarkan dalam mengerjakan skripsi.
2. Ayahanda Assuri dan Ibunda tercinta Indahyatiningsih
3. Saudara saya Kiki Rizki Susanti
4. Seluruh keluarga besar tersayang
5. Ibu Windi dan Bapak Beny selaku dosen pembimbing saya.
6. Teman-teman yang selalu menemani dan membantu selama proses perkuliahan.
7. Guru dan tenaga pengajar saya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
8. Civitas Akademik Fakultas Ilmu Komputer atas pelayanan yang sangat baik.
9. Almamater Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

## **MOTTO**

“ Percayalah, hati  
Lebih dari ini pernah kita lalui  
Jangan henti disini ”

-Float Sementara-

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildan Zainul Faki

NIM : 152410101007

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 November 2019

Yang menyatakan,

Wildan Zainul Faki

NIM 152410101007

**SKRIPSI**

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK  
(SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO MENGGUNAKAN  
PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENDOMAN  
EVALUASI SPBE**

Oleh:

**Wildan Zainul Faki**

**NIM 152410101007**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Windi Eka Yulia Retnani, S.Kom., MT

Dosen Pembimbing Pendamping : Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom

## **PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”, telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 18 Oktober 2019

tempat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Windi Eka Yulia Retnani, S.Kom., MT

NIP. 19840305201001220002

Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom

NIP. 760016852

## **PENGESAHAN PENGUJI**

Skripsi berjudul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”, telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 18 Oktober 2019

tempat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

Tim Penguji,

Penguji I,

Penguji II,

Yanuar Nurdiansyah, ST., M.Cs  
NIP. 198201012010121004

Fajrin Nurman Arifin, ST., M.Eng  
NIP. 198511282015041002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Komputer,

Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., M.Kom  
NIP. 196811131994121001

## RINGKASAN

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan pedoman Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Wildan Zainul Faki, 152410101007; 2019, 77 Halaman; Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dari fungsinya yang sangat membantu proses pelayanan di Pemerintah daerah, maka perlu adanya evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE yang mencakup domain tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE.

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar 2.79. Hasil asesmen tersebut berada di antara 2.6 - < 3.5 yang menunjukkan kualitas SPBE berada dikategori BAIK.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
2. Windi Eka Yulia Retnani, S.Kom., MT selaku Dosen Pembimbing Utama dan Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi;
3. Muhamad Arief Hidayat S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah mendampingi penulis sebagai mahasiswa;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo yang telah memberikan izin penelitian;
6. Ayahanda Assuri, Ibunda Indahyatiningsih, saudara perempuan Kiki Rizki Susanti dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, mendoakan dan menjadi sponsor utama penulis;
7. Guru-guruku mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
8. Sahabatku Yudis Jauhari Samsi, Sakti Prakasa, Achmad Firdaus, Ali Usman Fadhal dan seluruh keluar besar Panji Laok Family yang senantiasa memberi dukungan dan doa;

9. Temanku Ika Lastri Arifianti, Rohmatullah Yogi P, Yustisio, Rimas, Rian Bachtiar, Ricky Adi P, dan seluruh Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Situbondo di Jember (IMSJ) yang selalu mendukung dan memberikan doa;
10. Keluarga besar SELECTION seperjuangan angkatan 2015 yang selalu mendukung dan menjadi keluarga selama di perkuliahan;
11. Rekan berkembang dan berproses Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASIF) yang selalu memberi dorongan semangat;
12. Teman-teman di GenBI Jember dan Pembina yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman terbaik;
13. Teman-teman perkampusan Ricki Fredynansyah AP, Resha Maulana Praskanu, Eldianto, Bratasena, Ivan Dafiq yang telah sering di buat repot;
14. Teman perkopian Rohmattullah Yogi P, Hernanda Reksi, Gilang Ahmad, Rimas, Bagir, Ica;
15. Teman-teman Habib, Afri, Diba, Ulfa, Arif, Azhar, Mbak Ges, Arini, Boru, Elok, Firman, Egar, Mariya, Musa, Misnan dan Dianita yang sering banyak membantu dalam setiap pekerjaan perGenBIan;
16. Keluarga kecil KKN 294 Desa Opo Opo;
17. Rekan kerja Kolase Photo;
18. Rekan mencari konten Darma, Yogi, Dipta, Miuk, Awaly yang tergabung dalam GG Squad;
19. Keluarga besar Fespen 2016 dan 2017 serta Jong Situbondo;
20. Semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 11 November 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
RINGKASAN .....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Manfaat .....	4
1.5 Batasan masalah.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 E-Government .....	6
2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	7
2.3 Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik .....	7
2.4 RACI Chart .....	8
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	9
3.1 Jenis Penelitian.....	9
3.2 Objek Penelitian.....	9
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	9
3.4 Tahapan Penelitian .....	9
3.4.1 Studi Literatur .....	10
3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran .....	10
3.4.3 Pembuatan RACI <i>Chart</i> .....	14
3.4.4 Pengumpulan Data .....	14
3.4.5 Analisis Data .....	14

3.4.6 Penarikan Kesimpulan.....	16
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
4.1 Profil Objek Penelitian .....	17
4.1.1 Profil Kabupaten .....	17
4.1.2 Profil Narasumber .....	18
4.2 Sampel Penelitian .....	18
4.3 Pengumpulan Data .....	19
4.4 Hasil Asesmen.....	19
4.5 Pembahasan Hasil Perhitungan SPBE.....	22
4.5.1 Domain I Kebijakan Internal SPBE .....	23
4.5.2 Domain 2 Tata Kelola SPBE.....	25
4.5.3 Domain 3 Layanan SPBE.....	26
4.5.4 Indeks SPBE.....	28
4.6 Perhitungan SPBE .....	29
4.6.1 Perhitungan Hasil Asesmen.....	30
4.7 Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Hasil Asesmen .....	34
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran Pengembangan Penelitian.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian.....	9
Gambar 4.1 Domain I Kebijakan Internal SPBE .....	22
Gambar 4.2 Domain 2 Tata Kelola SPBE .....	24
Gambar 4.3 Domain 3 Layanan SPBE .....	26
Gambar 4.4 Indeks SPBE .....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Domain, aspek dan indikator penilaian SPBE.....	10
Tabel 3.2 Tingkat kematangan pada domain tata kelola SPBE dan kebijakan internal SPBE .....	11
Tabel 3.3 Tingkat kematangan pada domain layanan SPBE .....	12
Tabel 3.4. Bobot domain dan aspek .....	14
Tabel 3.5. kategori indeks SPBE .....	15
Tabel 4.1 <i>RACI Chart</i> Evaluasi SPBE Kabupaten Situbondo .....	17
Tabel 4.2 Hasil Asesmen Evaluasi SPBE .....	18
Tabel 4.3 Kategori SPBE .....	28
Tabel 4.4 Perhitungan Asesmmen dan Reasesmen .....	30

## BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan tugas akhir. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan masalah.

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh secara global kepada seluruh masyarakat. Salah satu dampak positif kemajuan dari perkembangan di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam lingkup pemerintah ialah munculnya *Electronic Government* atau yang disebut juga *e-Government* (Holle, 2011). *E-Government* dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti *electronic government*, *electronic governance*, *digital government*, *online government*, *eGov* dan lain-lain (Gronlun, 2004). *E-Government* merupakan suatu bentuk proses pemanfaatan teknologi informasi yang membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan pihak luar (Somantri & Hasta, 2017).

Pemerintah di dunia secara berkelanjutan menggunakan *e-Government* untuk transformasi penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi antara warga dan pemerintah, menyederhanakan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah, meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan penghematan uang pembayaran pajak (Gauld, 2010). *E-Government* ialah sebuah sistem yang mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan (Yogiswara, Noak, & Winaya, 2014).

Riset terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintahan telah banyak dilakukan yang mana secara umum e-government didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK oleh instansi dalam menjalankan pengelolaan serta penyediaan layanan publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). Penerapan *e-government* di Indonesia telah didukung oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003. Isi dari Inpres tersebut menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu pemerintah (Marudur & Erisva, 2017). Menindaklanjuti Inpres tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertindak sebagai eksekutor menetapkan peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”, maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE (Birokrasi Reformasi, 2018).

Menurut Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto dalam rapat koordinasi Meuju Situbondo Kota Pintar yang dibagikan oleh portal berita Times Indonesia bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo sedang mulai menerapkan *e-government* yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dalam hal kinerja, efektifitas dan efisiensi diseluruh sektor pemerintahan Kabupaten Situbondo dengan program bernama *Situbondo Smart Society*. Berdasarkan Laporan Pekerjaan Kegiatan Survei Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 Kabupaten Situbondo terdapat 78 aplikasi SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Beberapa contoh aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Tata Naskah (SITA), Aplikasi Pengusulan Satya Lancana Karya Satya, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Akrual (SIRKA) dan lain lain. 78 aplikasi tersebut memiliki rincian 15 buat sendiri, 27 dari kementrian, 35 dari pihak ketiga dan 1 dari dinas provinsi. Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian,

perkembangan pelaksanaan *pilot project* perkembangan infrastruktur TIK Kabupaten Situbondo untuk program “*Smart Society*” telah mencapai 43 SKPD, 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 1 Desa. Selain itu ada 65 titik internet seluruh Situbondo dan 30 titik wifi khusus untuk masyarakat umum ([timesindonesia.co.id /read/157435/20170927/134242/situbondo-tingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-society/](https://timesindonesia.co.id/read/157435/20170927/134242/situbondo-tingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-society/). 2017).

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo masih mengalami sejumlah kendala, seperti pengelolaan infrastruktur TIK di 46 SKPD Pemerintah Kabupaten dirasa masih kurang baik karena masih belum memenuhi beberapa indikator kelayakan, sumber daya manusia pada bidang TIK dirasa masih kurang baik serta sosialisasi dan koordinasi antar bagian atau lembaga terkait (Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian, 2016)

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi SPBE dengan harapan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur *progress* penerapan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Peneliti pada penelitian ini berperan sebagai evaluator eksternal, yang merupakan evaluasi yang diselenggarakan oleh staf yang di luar pelaksanaan program, evaluator eksternal lebih efektif karena independen dan mengambil pandangan objektif pada persoalan yang terjadi (Sanders & Sullins, 2006). Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui komponen apa saja yang kurang dari implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk menyiapkan dan menguji kesiapan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menghadapi evaluasi SPBE sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo?
2. Aspek apa saja yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE?
3. Apa rekomendasi perbaikan untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil evaluasi?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui aspek yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE.
3. Untuk rekomendasi perbaikan untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil evaluasi.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis  
Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang mampu memberikan masukan informasi yang terkait dengan judul penelitian kepada pembaca pada umumnya.
2. Bagi Peneliti  
Mengetahui bagaimana proses penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk mengevaluasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bagi Objek Penelitian  
Mengetahui kesiapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan nilai indeks SPBE.

### **1.5 Batasan masalah**

Beberapa hal yang membatasi penelitian ini, adalah :

1. Objek penelitian adalah Sistem Pemeritah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Instrumen pengukuran kuesioner pada penelitian yaitu menggunakan pedoman evaluasi SPBE yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.
3. Metode asesmen/evaluasi yaitu dengan wawancara menggunakan kuesioner yang berupa dokumen, pengumpulan bukti bukti pendukung, dan observasi langsung.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka terkait teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### 2.1 E-Government

*E-Government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, *e-government* adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan – kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Lee, 2009). *E-government* juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik internasional maupun antar Negara (Mustopadidjaja, 2003)

Tujuan dari *e-government* ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan *online* yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap *e-government*. Dengan demikian *e-government* membutuhkan *critical mass* dari *e-citizen* dan *e-businesses* untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. (Lee, 2009)

Di Indonesia inisiatif kearah *e-government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Keluarnya Intruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003, intruksi tersebut menyebutkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*.

Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

## **2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang berbunyi “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Pengguna SPBE adalah semua pengguna yang memanfaatkan layanan SPBE seperti Pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha (Birokrasi Reformasi, 2018). Dari fungsinya yang sangat membantu proses pelayanan di Pemerintah daerah, maka perlu adanya evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **2.3 Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah daerah (Kementerian PANRB,2018). Tujuan dilakukannya evaluasi SPBE adalah mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Pedoman Evaluasi SPBE, 2018).

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrument evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi; pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau

observasi lapangan, serta melakukan penilaian atas hasil pengumpulan data; dan pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan (Birokrasi Reformasi, 2018).

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model – model tingkat kematangan yang telah di praktikkan secara luas yaitu pertama CMM/CMMI (*Capability Maturity Model/CMM Integration*) yang merupakan model yang mengukur dari aspek tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak. Kemudian kedua ada *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis (Pedoman Evaluasi SPBE, 2018)

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah (Kementerian PANRB,2018).

#### **2.4 RACI Chart**

RACI *charts* adalah cara untuk mencari responden yang tepat sesuai yang dibutuhkan untuk menjadi narasumber. Langkah pertama dalam tahap pengumpulan pengolahan dan analisa data yaitu pemetaan dalam bentuk diagram RACI *charts* (*Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed* ) dimana *responsible* yang berarti penanggungjawab atau orang yang bertanggung jawab, *accountable* yang berarti pemilik kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan, *consulted* yang berarti pemberi konsultasi atau saran, dan *Informed* yang berarti penerima informasi atau yang harus diberi informasi atau yang harus mengetahui perkembangan dari suatu kegiatan yang dilakukan (G. Wirayudha, 2014).

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Tahap ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini.

### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data – data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti (Kasiram, 2008).

### **3.2 Objek Penelitian**

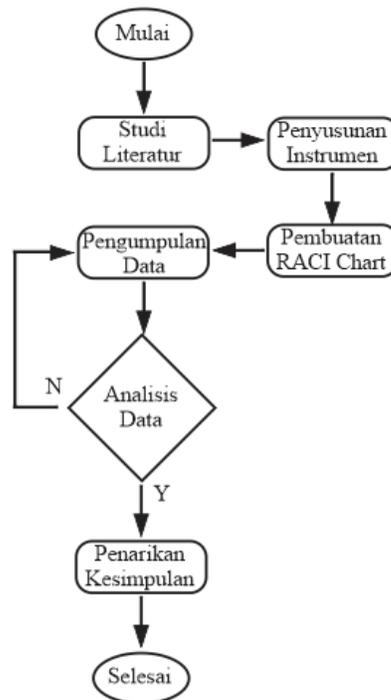
Pada penelitian ini objek yang diteliti merupakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2019. Penelitian ini akan lebih banyak dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian Kabupaten Situbondo. Pemilihan SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian sebagai SKPD yang bertanggung jawab penuh mengenai perencanaan, pengimplementasian, dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

### **3.4 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan urutan langkah penelitian yang dilakukan. Gambaran tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



*Gambar 3.1 Alur tahapan kegiatan*

#### 3.4.1 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data sebagai dasar penelitian dan pembahasan penyusunan dasar teori yang digunakan. Daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber penelitian ini berupa jurnal, buku pedoman evaluasi SPBE, dan karya tulis ilmiah dari penelitian yang terdahulu.

#### 3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran

Penyusunan instrumen pengukuran pada penelitian ini berdasarkan indeks Evaluasi SPBE untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai,
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai,
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari atau beberapaindikator yang bisa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Domain, aspek dan indikator penilaian SPBE

<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>
<b>Aspek 1</b>	<b>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</b>
Indikator 1	Kebijakan Internal tim pengarah SPBE instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal inovasi proses bisnis terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal rencana induk SPBE instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal anggaran dan belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal pengoperasian pusat data
Indikator 6	Kebijakan Internal integrasi sistem aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
<b>Aspek 2</b>	<b>Kebijakan Internal layanan SPBE</b>
Indikator 8	Kebijakan Internal layanan naskah dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal layanan manajemen kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal layanan manajemen keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal layanan manajemen kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal layanan pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal layanan pengaduan publik
Indikator 15	Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal layanan <i>whistle blowing system</i>
Indikator 17	Kebijakan Internal layanan publik instansi Pemerintah
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>
<b>Aspek 3</b>	<b>Kelembagaan</b>
Indikator 18	Tim pengarah SPBE instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi proses bisnis terintegrasi
<b>Aspek 4</b>	<b>Strategi dan Perencanaan</b>
Indikator 20	Rencana induk SPBE instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan belanja TIK
<b>Aspek 5</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
Indikator 22	Pengoperasian pusat data
Indikator 23	Integrasi sistem aplikasi
Indikator 24	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
<b>Domain 3</b>	<b>Layanan SPBE</b>
<b>Aspek 6</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis</b>

	<b>Elektronik</b>
Indikator 25	Layanan naskah dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
<b>Aspek 7</b>	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>
Indikator 32	Layanan pengaduan publik
Indikator 33	Layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 34	Layanan <i>whistle blowing system</i>
Indikator 35	Layanan publik instansi Pemerintah

#### 3.4.2.1 Tingkat kematangan kapabilitas proses

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2. tingkat kematangan pada domain tata kelola SPBE dan kebijakan internal SPBE

<b>Tingkat (level)</b>	<b>Karakteristik</b>
0 – tidak ada	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan dan hasil tidak terprediksi.
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar - dasar manajemen yang telah di denifisikan dan di dokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing – masing unit organisasi.
	Kebijakan internal telah dilegasasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.

3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan terstandarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 – terintegrasi dan terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

#### 3.4.2.2 Tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Tingkat kematangan pada domain layanan SPBE

<b>Tingkat</b>	<b>Kriteria</b>
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi

	dan layanan.
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

### 3.4.3 Pembuatan RACI *Chart*

Pembuatan RACI dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari calon responden yang tepat sesuai yang dibutuhkan atau yang berwenang untuk menjadi informan atau narasumber dalam memperoleh data dengan evaluasi dokumen, wawancara dan observasi langsung.

### 3.4.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan evaluasi dokumen, wawancara dan observasi langsung yang menggunakan pedoman Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementrian PANRB yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan suatu SPBE.

### 3.4.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data yaitu perhitungan untuk menentukan penilaian tingkat kematangan dan bobot serta menentukan nilai indeks secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada setiap indikator SPBE.

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut :

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu)
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua)
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga)

4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat)
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima)

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Tabel 3.4. Bobot domain dan aspek

<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Total bobot</b>
<b>Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
<b>Domain 3 – Layanan SPBE</b>	<b>11</b>	<b>55%</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Nilai indeks tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yang disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. kategori indeks SPBE

No	Nilai indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

#### 3.4.6 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tindak lanjut hasil analisis data sekaligus pemaparan hasil analisis data. Pada penelitian ini hasil analisis data adalah indeks yang digunakan untuk menghitung nilai tingkat kematangan pada setiap indikator. Dengan demikian isi dari penarikan kesimpulan ini adalah mengetahui tingkat kematangan implemetasi SBPE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, aspek-aspek yang perlu dilakukan pernaikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE serta merekomendasikan perbaikan implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

## **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai saran perbaikan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dan sebagai acuan untuk peneliti pada penelitian selanjutnya.

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti nilai indeks SPBE yang diperoleh dari asesmen yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan nilai 2.7925. Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan kualitas SPBE pada kategori BAIK.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa indikator yang perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu
  - a. Pada indikator 1, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE harus mencakup tugas - tugas yang sudah terintegrasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan 2) Kebijakan internal tersebut di pantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala.
  - b. Pada indikator 2, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Terdapat dan sudah ditetapkannya Kebijakan Internal yang mendukung adanya Standarisasi proses bisnis, 2) Adanya kebijakan khusus terkait alur kerja atau proses bisnis yang terintegrasi, karena pada bukti yang ada hanya menyangkut sistem aplikasi terintegrasi tanpa adanya alur kerja, dan 3) Kebijakan internal tersebut harus dinilai, dipantau dan dievaluasi secara berkala.

- c. Pada indikator 3, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal yang ada harus mampu mencakup semua dari visi, misi, arsitektur, dan peta jalan SPBE, 2) Kebijakan internal harus mencakup adanya integrasi dan 3) Kebijakan internal harus dievaluasi secara berkala terkait rencana induk yang ada.
- d. Pada indikator 4, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Membuat dan mengesahkan Kebijakan Internal terkait Perencanaan dan Penganggaran TIK, 2) Kebijakan Internal yang ada harus mencakup seluruh muatan dari rencana induk, 3) Kebijakan internal yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem lain, dan 4) Kebijakan internal harus dievaluasi, karena bukti yang ada hanya berupa laporan pertahun tanpa ada kebijakan tertulis tentang perencanaan dan penganggaran TIK.
- e. Pada indikator 5, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijakan harus evaluasi secara berkala.
- f. Pada indikator 6, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijakan internal harus mencakup proses evaluasi secara berkala.
- g. Pada indikator 7, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup seluruh penggunaan di semua instansi, 2) Kebijakan Internal yang ada harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 3) Kebijakan internal yang ada harus dievaluasi secara berkala.
- h. Pada indikator 8, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup

integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijakan harus evaluasi secara berkala.

- i. Pada indikator 9, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijakan harus evaluasi secara berkala.
- j. Pada indikator 10, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup seluruh penggunaan disemua instansi, 2) Kebijakan Internal yang ada harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 3) Kebijakan internal yang ada harus dievaluasi secara berkala.
- k. Pada indikator 12, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijakan harus evaluasi secara berkala.
- l. Pada indikator 16, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijakan harus evaluasi secara berkala.
- m. Pada indikator 19, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Membuat dan mengesahkan Proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi, 2) Proses bisnis (alur kerja) yang ada harus diterapkan diseluruh instansi pusat atau pemerintah, 3) Proses bisnis (alur kerja) yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem lain, dan 4) Proses bisnis (alur kerja) harus dikembangkan dari hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- n. Pada indikator 20, Untuk mencapai level maksimum maka perlu adanya perbaikan dan penambahan yaitu 1) Dokumen rencana induk harus memuat seluruh muatan seperti visi, misi, arsitektur serta peta jalan, 2) Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE secara konsisten pada 3

tahun mendatang dan 3) Butuh adanya sebuah pemantauan dan evaluasi secara berkala.

- o. Pada indikator 21, Untuk mencapai level maksimum maka perlu adanya perbaikan dan penambahan pada 1) Membuat sebuah perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam rencana kerja tahunan yang dikonsultasikan dengan pengelola TIK, 2) perencanaan dan penganggaran TIK yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem lain dan 3) adanya hasil evaluasi dari perencanaan dan penganggaran TIK ini dapat menjadi masukan perbaikan.
- p. Pada indikator 23, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan pada 1) penambahan integrasi sistem yang dapat dinilai, dikendalikan, dan dievaluasi, 2) adanya tindakan seperti evaluasi serta pengembangan dari integrasi sistem aplikasi tersebut.
- q. Pada indikator 24, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan seperti 1) sudah digunakan diseluruh instansi pemerintah terkait aplikasi umum berbagi pakai, 2) adanya tindakan pengendalian, penilaian dan evaluasi, dan 3) adanya hasil evaluasi yang digunakan untuk proses peningkatan.
- r. Pada indikator 26, Untuk mencapai level maksimum, perlu adanya perbaikan dan penambahan seperti 1) kolaborasi dengan dengan suatu layanan SPBE atau adanya integrasi dengan layanan SPBE serta adanya 2) usaha peningkatan terus menerus sesuai perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- s. Pada indikator 29, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan seperti 1) layanan kolaborasi dan integrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan dan 2) melakukan peningkatan sistem keuangan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

- t. Pada indikator 30, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan seperti 1) layanan kolaborasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, RKPD dan sebagainya serta 2) sistem yang ada dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- u. Pada indikator 34, Untuk mencapai level maksimum perlu perbaikan dan penambahan seperti 1) adanya kolaborasi dengan sistem lain seperti manajemen kinerja atau dengan sistem SPBE lainnya dan 2) sistem yang ada dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- v. Pada indikator 35, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan seperti 1) sistem dapat merespon kepada pengguna yang berkaitan dengan permohonan pelayanan, 2) adanya kolaborasi dan integrasi serta 3) sistem pelayanan publik tersebut dapat ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- w. Pada indikator 36, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan fitur seperti 1) penambahan fitur yang mampu melakukan proses layanan interaksi dan transaksi, 2) adanya kolaborasi dan integrasi, serta 3) sistem pelayanan public tersebut dapat ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- x. Pada indikator 37, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya perbaikan dan penambahan seperti 1) sistem dapat merespon kepada pengguna yang berkaitan dengan permohonan pelayanan, 2) adanya kolaborasi dan integrasi serta 3) sistem pelayanan publik tersebut dapat ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

## **5.2 Saran Pengembangan Penelitian**

Adapun saran yang ditujukan untuk memberikan masukan yang lebih baik yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa indikator dibawah level 3 yang dibuat untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga mampu mencapai level yang maksimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan kombinasi beberapa alat ukur serta bisa menggunakan metode lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Fawaid., 2017, Situbondo Tingkatkan Pelayanan Dasar Melalui Program Smart Society <https://www.timesindonesia.co.id/read/157435/20170927/134242/situbondo-tingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-society/>
- BANK, W. 2012. <http://web.worldbank.org/e-Government>.
- Birokrasi Reformasi, D. A. N. K. P. (2018). Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, 2017.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo. (2016). Laporan Pekerjaan Kegiatan Survei Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi pada seluruh SKPD Kabupaten Situbondo tahun 2016
- Damamik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). Egovernment dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(2), 151-164.
- GAULD, R. A. 2010. Do they want it? Do they use it? The demand-side of e-government in Australia and New Zealand. *Government Information Quarterly*.
- Gronlund, A (2004) State of the Art in e-Gov Research – A Survey In R. Traunmuller (ed) *Electronic Government. Third International Conference. EGOV*, pp 178-185. Berlin:Springer.
- Heeks, R. (2008). “ICT4D 2.0: The Next Phase of Applying ICT for International Development”. Washington, DC: IEEE.
- Holle (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya Meminimalisir Praktek dalam Administrasi dalam Meningkatkan Public Service. *Jurnal SASI*, 21-30
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).
- Kasiram, Moh. 2008. Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Pers
- Kim, D. Y., & Grant, G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration. *Journal of Systems and Information Technology*, 230 - 244.

- Lee, N.Y. (2009). Modul 3 Penerapan E-Government. APCICCT.
- Marudur, P. D., & Erisva, H. P. (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau).
- Mustafadidjaya, AR (2003). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: (SANKRI), LAN.
- Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.* (2018). Jakarta: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor 5 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
- Robert M. Davison, Christian Wagner, Louis C.K. Ma (2005) "From government to e-government: a transition model", Information Technology & People, Vol 18
- Sanders, J. R. & Sullins, C.D. 2006. Evaluating school programs. (3rd ed). Thousand Oaks: Corwin Press.
- Somantri, O., & Hasta, I. D. (2017). Implementasi e-government Pada Kelurahan Pesurungan. Tegal: Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT) ,Vol. 2, No. 1, Januari 2017
- Yogiswara, P. K., Noak. P. A., & Winaya, I, K. (2014). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klukung).

## LAMPIRAN

**NAMA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH** : PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

**NAMA PENANGGUNG JAWAB (SUPERVISOR)** : DADANG ARIES BINTORO, S.Sos., M.Si.  
**NIP** : 19760627 199412 1 001  
**JABATAN** : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SITUBONDO

**NAMA OPERATOR** : FERY FRANDANA PUTRA, S.Kom.  
**NIP** : 19910818 201503 1 003  
**JABATAN** : STAF SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Indikator 1

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Pertanyaan	Apakah Instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE/TIKI?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Kebijakan internal terkait tim pengarah terdapat di SK Panitia Pelaksana Operasional S3, 2) SK Bupati tentang Panitia Pelaksana Operasional, 2. PERBUP 14 Tahun 2017 halaman 6			
Data dukung:	1. SK Bupati tentang Panitia Pelaksana Operasional, 2. PERBUO 14 Tahun 2017 Hal 6			

## Indikator 2

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait standarisasi proses bisnis.			<input checked="" type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait standarisasi penyusunan proses bisnis.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Tidak mempunyai, karena dengan data yang ada hanya menyinggu tentang integrasi saja tanpa adanya proses bisnis			
Data dukung:	-			

## Indikator 3

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait rencana induk SPBE?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait rencana induk SPBE.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup hanya sebagian dari muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, atau peta			<input checked="" type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 tentang rencana induk terdapat pada Masterplan eGovernment Kabupaten Situbondo dan PERBUP Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart Society, 2) level 2 dibuktikan dengan adanya tujuan dari rencana induk tersebut yang ada pada Masterplan dan PERBUP 14 Tahun 2017 Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart Society			
Data dukung:	1. Masterplan eGovernment Kabupaten Situbondo, 2. PERBUP Tahun 2017 Tahun 2017 Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart Society,			

## Indikator 4

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian muatan dari rencana induk SPBE.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Dengan bukti yang ada yang tidak dapat mencapai level 1			
Data dukung:	-			

### Indikator 5

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data ( <i>data center</i> )?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 terdapat pada SK Bupati Panitia Pelaksana Fasilitas Pusat Data Kabupaten Situbondo; 2) Level 2, 3 terdapat pada SK bupati yang sama dengan dijelaskan pada masuknya instansi lain dalam satu pemerintahan pada anggota susunan keanggotaan pelaksanaan			
Data dukung:	1. SK Bupati Panitia Pelaksana Fasilitas Pusat Data Kabupaten Situbondo			

### Indikator 6

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada sebagian sistem aplikasi di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 diperkuat dengan adanya Edaran Bupati tentang Integrasi dan Operasional Intellegenci Room; 2) Level 2 dan 3 di perkuat pada Edaran Bupati yang menjelaskan bahwa seluruh OPD masing masing di intruksikan melakukan integrasi data dan informasi serta pada SK Bupati TIM Pengelola IR yang menjelaskan bahwa ruang lingkup layanan IR ini meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan, Ekonomi dan Sistem Pelayanan Masyarakat Online;			
Data dukung:	1. Edaran Bupati tentang Integrasi dan Operasional Intellegenci Room, 2. SK Bupati Tim Pengelola IR			

### Indikator 7

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			<input checked="" type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan; hanya sebagian aplikasi umum berbagi pakai telah diatur dalam kebijakan internal tersebut.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 diperkuat di Perbup 14 / 2017 halaman 51 tentang data dan pangkalan data sekaligus adanya SK Bupati tentang aplikasi			
Data dukung:	1. PERBUP 14 Tahun 2017 tentang Data dan Pangkalan Data, 2. SK Bupati			

### Indikator 8

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem naskah dinas elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara ataupun antar Instansi			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan:	1) Level 1 terdapat kebijakan pada Perbup 46 tahun 2017 tentang Pedoman tata naskah elektronik; 2) Level 2 dan 3 terdapat pada halaman 5;			
Data dukung:	1. Perbup 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Elektronik			

### Indikator 9

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegaw aian	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem kepegaw aian.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem kepegaw aian.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegaw aian pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kepegaw aian di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegaw aian dengan sistem manajemen kepegaw aian Badan Kepegaw aian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan:	1) Level 1 terdapat pada Raperbup Sistem Informasi Kepegaw aian; 2) Level 2 dan 3 terdapat pada Raperbup Sistem Informasi Kepegaw aian Pasal 2, pasal 5, pasal 8;			
Data dukung:	1. Raperbup Sistem Informasi Kepegaw aian			

### Indikator 10

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.			<input checked="" type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level satu terdapat kebijakan yang berkaitan dengan Sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada SK Bupati dan SK Kepala BPPKAD			
Data dukung:	1. SK Bupati dan SK Kepala BPPKAD			

### Indikator 11

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2, 3 didukung dengan adanya SK Bupati dan SK Kepala BPPKAD, 2) Level 4 terdapat pada Laporan Koordinasi Integrasi Aplikasi SIRKA			
Data dukung:	1. SK Bupati dan SK Kepala BPPKAD, 2. Laporan Koordinasi Integrasi Aplikasi SIRKA			

### Indikator 12

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 terdapat pada Perbup Nomor 33 tahun 2018 pasal 22			
Data dukung:	1. Perbup Nomor 33 Tahun 2018			

### Indikator 13

	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengadaan secara elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2, 3 terdapat pada Perbup no 4 tahun 2011 pada halaman 3 yang mengatakan bahwa dilakukan secara elektronik;			
Data dukung:	1. Perbup Nomor 4 Tahun 2011			

### Indikator 14

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 terdapat pada SK Bupati Lapor; 2) Level 2 dan 3 terdapat pada SK Bupati Lapor; 3) Level 4 terdapat pada Surat Integrasi SIDUMAS dan SK Bupati Lapor ;			
Data dukung:	1. SK Bupati Lapor, 2. Surat Integrasi SIDUMAS			

### Indikator 15

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Pada level 1 terdapat pada PERDA 17 Tahun 2013 halaman 4; 2) Level 2, 3, dan level 4 dibuktikan dengan adanya integrasi website JDIH Situbondo dengan Provinsi.			
Data dukung:	1. PERDA 17 Tahun 2013			

### Indikator 16

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait WBS.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait WBS.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Pada level 1 terdapat pada SK Bupati Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Whistle Blowing System yang; 2) Pada level 2 dan 3 sudah tercantum pada Perbup Pedoman Pelaksanaan Whistle Blowing System;			
Data dukung:	1. SK Bupati Unit Pengelola Pengaduan (UPP), 2. Perbup Pelaksanaan WBS			

### Indikator 17

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Pertanyaan	Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara?	
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 terdapat kebijakan yang tertuang pada PERDA tentang Pelayanan Publik Halaman 6; 2) Level 2 dan 3 terdapat pada PERDA tentang Pelayanan Publik pada pasal 28; 3) Level 4 terdapat pada pasal 7 PERBUP No 6 Tahun 2014;			
Data dukung:	1. PERDA tentang Pelayanan Publik, 2. PERBUP Nomor 6 Tahun 2014			

### Indikator 18

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Kelembagaan	Pilihan Saudara
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Pertanyaan	Apakah instansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	
Level 0	Tidak terdapat Tim pengarah SPBE.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat Tim pengarah SPBE, tetapi belum dilegalisasi; Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sementara (ad-hoc).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Terdapat Tim pengarah SPBE, dan sudah dilegalisasi; Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE telah melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kinerja Tim pengarah SPBE ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, level 2, level 3 dan level 4 terdapat pada SK BUPATI PANITIA PELAKSANA OPERASIONAL SITUBONDO SMART SOCIETY;			
Data dukung:	1. SK Bupati Panitia Pelaksana Operasional Situbondo Smart Society			

### Indikator 19

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Kelembagaan	Pilihan Saudara
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	
Level 0	Tidak terdapat dokumen proses bisnis pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat dokumen proses bisnis yang disusun secara sementara (ad-hoc); Belum terdapat standarisasi proses bisnis.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi diperbaiki secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Bukti yang diberikan tidak mampu mencapai level 1			
Data dukung:	-			

### Indikator 20

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	Pilihan Saudara
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?	
Level 0	Tidak terdapat dokumen rencana induk SPBE.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep dokumen rencana induk SPBE.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup sebagian dari muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.			<input checked="" type="radio"/> Level 2
Level 3	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi secara berkala			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Peta jalan rencana induk SPBE dilakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 terdapat pada PERBUP 14 TAHUN 2017 PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SITUBONDO SMART SOCIETY serta ada pada masterplan;			
Data dukung:	1. Perbup 14 Tahun 2017 PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SITUBONDO SMART SOCIETY, 2. Masterplan eGov Kabupaten Situbondo			

### Indikator 21

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	Pilihan Saudara
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?	
Level 0	Tidak terdapat perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE.			<input checked="" type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Dengan bukti yang ada tidak dapat mencapai level 1			
Data dukung:	-			

### Indikator 22

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki layanan pusat data ( <i>data center</i> )?	
Level 0	Tidak terdapat layanan pusat data ( <i>data center</i> ).			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Tersedia layanan pusat data ( <i>data center</i> ) yang disediakan oleh jasa layanan pusat data non pemerintah.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Tersedia satu atau lebih layanan pusat data ( <i>data center</i> ) yang dimiliki oleh instansi pemerintah; Terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data; Sudah dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah; pengendalian layanan berada di beberapa unit kerja/perangkat daerah.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Prosedur pengoperasian baku pusat data ( <i>data center</i> ) telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data ( <i>data center</i> ) dilakukan secara terpusat; Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data ( <i>data center</i> ).			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Kinerja pengoperasian layanan pusat data ( <i>data center</i> ) ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 dibuktikan dengan adanya SK STAF PELAKSANA PUSAT DATA; 2) Level 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya SOP penggunaan pusat data dan SK Bupati; 3) Untuk bukti bahwa adanya proses yang dilakukan secara terpusat yaitu dengan adanya SK Perubahan Panitia Data Center.			
Data dukung:	1. SK Staf Pelaksana Pusat Data, 2. SOP Penggunaan Pusat Data, 3. SK Perubahan Panitia Data Center			

### Indikator 23

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah melakukan integrasi sistem aplikasi?	
Level 0	Tidak terdapat rencana integrasi sistem aplikasi.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat integrasi sistem aplikasi secara sementara (ad-hoc).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Integrasi sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Integrasi sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Level 1 dibuktikan dengan adanya Situbondo Tera' pada SK Bupati TIM Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Situbondo Tera', Level 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya SK Kadis Kominfo tentang Situbondo Tera'			
Data dukung:	1. SK Bpati Tim Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Situbondo Tera', 2. SK Kadis Kominfo tentang Situbondo Tera'			

### Indikator 24

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?	
Level 0	Tidak terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc); Belum terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai			<input checked="" type="radio"/> Level 1
Level 2	Terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kinerja aplikasi umum berbagi pakai ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1 terdapat bukti yaitu adanya Aplikasi Situbondo Tera'			
Data dukung:	1. Edaran Sekda - Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Situbondo Tera'			

### Indikator 25

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem naskah dinas elektronik?	
Level 0	Tidak terdapat sistem naskah dinas.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem naskah dinas elektronik hanya menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya Aplikasi e-Surat; 2) Level 4 dibuktikan bahwa sistem tersebut berintegrasi dengan Rekam Jejak Pegawai			
Data dukung:	1. eSurat, 2. Rekam Jejak Pegawai			

### Indikator 26

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegaw aian	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegaw aian?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kepegaw aian.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem manajemen kepegaw aian menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem manajemen kepegaw aian menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegaw aian dan mengunduh dokumen data diri pegawai.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem manajemen kepegaw aian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem manajemen kepegaw aian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegaw aian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegaw aian Negara (BKN).			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem manajemen kepegaw aian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya sistem aplikasi pelayanan kepegaw aian (SAPK);			
Data dukung:	1. Aplikasi Pelayanan Kepegaw aian			

### Indikator 27

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen perencanaan?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem manajemen perencanaan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya sistem informasi perencanaan dan keuangan akrual (SIRKA), 2) Level 4 dibuktikan dengan adanya integrasi dengan keuangan			
Data dukung:	1. Tangkapan layar SIRKA			

### Indikator 28

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen penganggaran.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem manajemen penganggaran menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya sistem informasi perencanaan dan keuangan akrual (SIRKA), 2) Level 4 dibuktikan dengan adanya integrasi dengan perencanaan			
Data dukung:	1. Tangkapan layar SIRKA			

### Indikator 29

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem manajemen keuangan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dokumen terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegaw aian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya sistem informasi perencanaan dan keuangan akrual (SIRKA)			
Data dukung:	1. Tangkapan layar SIRKA			

### Indikator 30

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kinerja?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kinerja.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti indikator dan target kinerja.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (persentase) kemajuan kinerja.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrebang, dan sebagainya.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya aplikasi e-Kinerja			
Data dukung:	1. Tangkapan layar Aplikasi e-Kinerja			

### Indikator 31

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 31	Layanan Pengadaan	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?	
Level 0	Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen, dan memasukkan data terkait pengadaan.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya LPSE online; 2) serta adanya integrasi dengan website lelang Kabupaten Situbondo			
Data dukung:	1. Tangkapan layar LPSE, 2. Tangkapan layar lelang			

### Indikator 32

Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?	Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pengaduan publik			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem pengaduan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Pada level 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya pengaduan online pada Aplikasi Situbondo Tera' yang mampu melakukan interaksi mencari informasi dan menyampaikan pengaduan, serta dapat melihat kemajuan pengaduan; 2) Pada level 4 dibuktikan dengan adanya integrasi dengan Sidumas dan LAPOR;			
Data dukung:	1. Tangkapan layar Situbondo Tera' yang terdapat pengaduan publik			

### Indikator 33

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	
Level 0	Tidak terdapat sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi hukum, regulasi, dan lain sebagainya.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.			<input checked="" type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Pada level 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya Aplikasi Android JDIH dan Website JDIH Kabupaten Situbondo; 2) Pada level 4 dibuktikan dengan adanya integrasi dengan JDIH Provinsi			
Data dukung:	1. Tangkapan layar Aplikasi dan Website JDIH			

### Indikator 34

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 34	Layanan Whistle-Blowing System	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?	
Level 0	Tidak terdapat WBS			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.			<input checked="" type="radio"/> Level 3
Level 4	WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	1) Pada level 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya aplikasi Whistle Blowing System;			
Data dukung:	1. Tangkapan layar WBS			

### Indikator 35

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Pertanyaan	1) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			<input checked="" type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Aplikasi Situbondo Tera' hanya mampu melakukan interaksi tanpa ada balasan dari sistem			
Data dukung:	1. Tangkapan layar Situbondo Tera'			

### Indikator 36

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Pertanyaan	2) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			<input checked="" type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Sikembarkepo (Sistem Informasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok) hanya menyediakan informasi satu arah saja.			
Data dukung:	1. Tangkapan layar Sikembarkepo			

### Indikator 37

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Pertanyaan	3) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			<input checked="" type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Sipesah (Sistem Informasi Pengendalian Sampah) hanya mampu melakukan interaksi tanpa ada tanggapan dari sistem			
Data dukung:	1. Tangkapan layar Sipesah			